

DETERMINAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BULU LOR KOTA SEMARANG

Hermawan Budiyanto, S.Sos., M.Si *)

Abstrak

Permasalahan sampah di kota-kota besar saat ini sudah saatnya untuk ikut memberdayakan masyarakat untuk mengurangi, mengolah, menggunakan kembali sampah ditingkat sumber. Di Kota Semarang sudah dilaksanakan upaya pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat dengan melibatkan pemerintah dalam penyediaan sarana-prasarana dan pelatihan. Harapan dengan keterlibatan masyarakat ini adaah nantinya dapat dijadikan sebagai percontohan di tempat lain dalam mengurangi sampah yang akan dibuang ke TPA. Dalam pelaksanaannya rencana kegiatan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. faktor utama yang mempengaruhinya adalah faktor mudah tidaknya masalah dikendalikan yang meliputi 1) kesukaran teknis, 2) keragaman perilaku kelompok sasaran, 3) persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk dan 4) ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan. factor selanjutnya yang mempengaruhi adalah kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses pelaksanaan yang berupa kejelasan dan konsistensi tujuan, sedangkan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi meliputi 1) kondisi sosial ekonomi dan teknologi, 2) dukungan public, 3) sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok.. dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hal pokok yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah yaitu jumlah masyarakat yang terlibat perlu ditingkatkan lagi, perlunya dilakukan pola insentif dan disentif bagi masyarakat yang terlibat dalam program pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat ini.

Kata Kunci : Implementasi, Pemberdayaan Masyarakat.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat wajib untuk dilakukan secara maksimal. tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak pelayanan public yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, akibatnya banyak permasalahan yang muncul baik dalam bidang kesejahteraan, kesehatan maupun lingkungan. salah satu pelayanan publik yang wajib dilakukan oleh pemerintah adalah dalam penanganan sampah.

*) Jurusan Administrasi Niaga FISIP Universitas Pandanaran

Pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan berupa pengambilan sampah dari masyarakat, pengangkutan dan pengelolaan sampah ke TPA. Tetapi dalam pelaksanaannya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum berjalan secara maksimal. Tingkat pelayanan yang masih rendah menyebabkan masih banyak sampah yang tidak terangkut. Hal ini tentu saja akan menimbulkan dampak bagi lingkungan yang kotor yang akan menimbulkan penyakit. belum maksimalnya pengelolaan sampah tersebut disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dan terbatasnya SDM. demikian juga halnya yang ada di Kota Semarang dengan jumlah sampah yang semakin bertambah setiap tahunnya sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk.

Tahun 2009 timbulan sampah Kota Semarang mencapai $\pm 3.937,09 \text{ m}^3/\text{hari}$ sampah domestik dan $714,30 \text{ m}^3/\text{hari}$ dari sumber non domestik. Total produksi sampah harian Kota Semarang sebesar $4.651,39 \text{ m}^3/\text{hari}$. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang pada tahun 2009 ini mencapai 1.453.549 jiwa. Permasalahan yang kemudian muncul adalah untuk pengelolaan sampah di Kota Semarang yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan saat ini baru menjangkau 127 Kelurahan dari 177 Kelurahan yang ada (74%), dan dari jumlah sampah yang dapat terangkut ke TPA baru mencapai 64% sampah. Pada akhirnya dampak yang kemudian muncul adalah masih adanya timbulan sampah yang tidak terangkut setiap harinya di beberapa tempat. Dampak yang muncul akan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan karena terbatasnya lahan untuk membuang sampah yang berakibat pada perilaku masyarakatnya yang membuang sampah di sembarang tempat.

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kebersihan di Kota Semarang tertuang dalam Perda No. 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Undang-Undang tersebut mengatur tentang kegiatan kebersihan di Kota Semarang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota bersama-sama seluruh warga masyarakat. Untuk meningkatkan pengelolaan sampah supaya lebih optimal maka dibentuk 12 sektor pelayanan yang masing-masing sektor bertanggung jawab kepada Seksi Pelayanan Kebersihan pada Sub Dinas Operasional. Dalam pelaksanaannya pengelolaan sampah yang dilakukan belum dapat maksimal sehingga Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan SK

Walikota Semarang No. 660.2/2001 Tanggal 20 April 2001 tentang Penyerahan sebagian tugas Dinas Kebersihan kepada Kecamatan di Kota Semarang, melalui kebijakan tersebut diharapkan pengelolaan sampah di Kota Semarang dapat dilaksanakan secara merata.

Upaya lain yang dilakukan untuk dapat memaksimalkan pengelolaan sampah di Kota Semarang adalah dengan mengikutsertakan masyarakat secara langsung dalam pengurangan timbulan sampah di tingkat sumber. Model peran serta yang dilakukan adalah melalui percontohan pengelolaan sampah 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) berbasis masyarakat. Proyek percontohan tersebut di Kota Semarang sampai saat ini berjumlah 8 lokasi yaitu di Perumahan Bukit Kencana, Pemukiman Jomblang Kelurahan Jomblang, Pemukiman Ringin Telu Kelurahan Kalipancur, Pemukiman Kelurahan Bulu Lor, Pemukiman Sendangguwo, Pemukiman Bendan Dhuwur, Perumahan Sampangan, dan Perumahan Padangsari di Kecamatan Banyumanik. Bentuk kegiatan yang dilakukan melalui pengelolaan sampah 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) berbasis masyarakat adalah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos di tingkat kawasan (1.000 kk), sehingga diharapkan sampah yang dibuang ke TPA akan berkurang.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terdapat kegagalan dalam Perda No. 6 Tahun 1993 terkait dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama untuk pengelolaan sampah 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) di beberapa lokasi percontohan di Kota Semarang. Kegagalan implementasi yang ada meliputi jumlah masyarakat yang melakukan pemilahan sampah di tingkat sumber maupun iuran biaya operasional rendah, rendahnya keterlibatan pengurus dalam mengelola sampah 3R dan yang paling memprihatinkan adalah berhentinya kegiatan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat di Kelurahan Bulu Lor adalah masalah teknis terkait dengan pemilahan di tingkat rumah tangga dimana banyak warga masyarakat yang merasa sulit untuk melakukan pemilahan sampah, hal ini disebabkan selama ini keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah hanya terbatas pada iuran sampah, mengelola pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS. Kesulitan teknis lainnya yang ada meliputi penggunaan tenaga pengangkut

sampah dengan memanfaatkan tenaga pengambil sampah yang ada. Jumlah tenaga pengambil dan pengolah sampah hanya dibatasi 2 orang sedangkan pengambil sampah sebelumnya dalam satu RW rata-rata berjumlah 4 orang, hal ini tentunya dengan diberlakukannya program tersebut akan memberhentikan petugas lainnya yang sudah ada dan dikuatirkan akan menimbulkan masalah sosial.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

B.1. Identifikasi Masalah

Pengelolaan sampah 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) berbasis masyarakat merupakan kegiatan pengurangan jumlah sampah di tingkat sumber/rumah tangga sebelum di buang ke TPS. Kegiatan ini didasari pada masih rendahnya tingkat pelayanan pemerintah Kota Semarang dalam menangani sampah yang semakin bertambah, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengolah sampah yang mereka hasilkan.

Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi di Kelurahan Bulu Lor, peneliti bermaksud mengetahui kegagalan implementasi kebijakan Perda tentang kebersihan yang terkait dengan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah di tingkat sumber.dengan menganalisis determinasi faktor-faktor implementasi kebijakan dan langkah-langkah mengatasi kegagalan tersbut.

B.2. Perumusan Masalah

1. Mengapa terjadi kegagalan dalam implementasi Perda No. 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan khususnya tentang peran serta masyarakat di Kelurahan Bulu Lor..
2. Bagaimana mengatasi kegagalan dalam implementasi Perda No. 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan khususnya tentang peran serta masyarakat di Kelurahan Bulu Lor.

B.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi Perda No 6 Tahun 1993 tentang kebersihan dengan penekanan pada peran serta masyarakat di Kelurahan Bulu Lor;

2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi kesenjangan dalam implementasi Perda No 6 Tahun 1993 tentang kebersihan dengan penekanan pada peran serta masyarakat di Kelurahan Bulu Lor.

II. Metodologi Penelitian

A. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian diskriptif kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan diambil merupakan potret sesaat (Cross Sectional Research) yaitu meneliti suatu fenomena permasalahan pada suatu titik waktu. Penelitian ini dilakukan pada satu organisasi yaitu pada Kelompok Swadaya Masyarakat organisasi sebagai pengelola sampah.

C. Fenomena Pengamatan

Adapun fenomena penelitian yang akan diteliti adalah :

- 1) Mudah tidaknya masalah dikendalikan dengan indikator yang akan diteliti mencakup:
 - a. kesukaran teknis
 - b. keragaman perilaku kelompok sasaran
 - c. persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk
 - d. ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.
- 2) Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses pelaksanaan dengan indikator yang akan diteliti mencakup:
 - a. kejelasan dan konsistensi tujuan
- 3) Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi dengan indikator yang akan diteliti mencakup:
 - a. kondisi sosial ekonomi dan teknologi

- b. dukungan publik
- c. sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok

D. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen, observasi dan wawancara. Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumenter

E. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis induktif. Tiga alur pendekatan yang dilakukan adalah :

1. Reduksi data (pengurangan atau pemotongan), diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan hasil penelitian.
2. Display data, yaitu menampilkan, menyajikan data dengan bahasa naratif.
3. Menarik kesimpulan/verifikasi.

III. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan disini untuk melihat determinan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah 3R di Kelurahan Bulu Lor. Adapun faktor yang diteliti meliputi faktor mudah tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses pelaksanaan, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Pembahasan untuk masing-masing faktor secara lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan berikut ini.

a. Kesukaran Teknis

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung pada sejumlah

persyaratan teknis, termasuk diantaranya kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. seperti masih rendahnya kesadaran para pelaku, relative mahal nya peralatan yang digunakan dan masih rendahnya pengetahuan teknis para pejabat di daerah mengenai masalah yang ditangani. Dari hasil pendataan yang dilakukan dilapangan menunjukkan hasil bahwa masalah teknis yang muncul berupa :

- sampah masih belum dipilah sehingga dilakukan pemilahan di TPST dan membutuhkan waktu yang lama.
- Peran serta masyarakat yang masih rendah terutama dalam bidang pnyedian tempat sampah untuk jenis sampah yang berbeda. memilah sampah dan peran serta dalam iuran untuk operasional TPST.
- Setiap program jelas akan menyangkut masalah biaya yang biasanya dikumpulkan dari kelompok-kelompok sasaran. Biaya yang dipikul tidak sebanding dengan tindakan-tindakan perbaikan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Dana operasional yang terbatas dimana dana seharusnya didapat dari masyarakat diwilayah pelayanan tetapi dalam kenyataannya dana operaionsal ditanggung oleh kelurahan. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan konsep pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.
- Adanya teknologi yang canggih yang menjadi syarat dapat dilaksanakannya suatu program baru mungkin akan menimbulkan desakan-desakan keras berbagai pihak untuk menunda sementara waktu maksud pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan hingga diperoleh kepastian bahwa telah tersedia sarana atau teknologi yang dapat menjamin efektifitas pencapaian tujuan tersebut. Dalam hal ini teknologi yang digunakan dalam pengelolaan sampah 3R menggunakan teknologi yang mudah untuk dilaksanakan dengan penyediaan sarana dan prasarana disediakan oleh pemerintah.

b. Keragaman Perilaku Kelompok Sasaran

Semakin beragam perilaku yang diatur atau semakin beragam pelayanan yang diberikan, semakin sulit upaya untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas, dan dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus diberikan

kepada para implementor dilapangan. Mengingat adanya kemungkinan perbedaan komitmen para implementor di lapangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan, maka pemberian kebebasan bertindak tersebut kemungkinan akan menimbulkan perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar dalam tingkat keberhasilan pelaksanaan program. Dari hasil pendataan di lapangan menunjukkan hasil :

- perilaku kelompok sasaran yaitu pengurus KSM cenderung sama yaitu setuju untuk mengelola sampah di wilayah uji coba.
- perilaku kelompok sasaran berupa warga masyarakat di wilayah uji coba menunjukkan adanya perbedaan yaitu menerima, menolak program pengelolaan sampah 3R dan warga yang tidak jelas menerima atau menolak. Alasan dari mereka yang menerima adalah adanya nilai tambah yang akan didapat dari keikutsertaan program ini, sedangkan warga yang menolak beranggapan bahwa akan menimbulkan polusi udara berupa bau dari sampah yang diolah, warga merasa pesimis program akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, warga merasa keberatan kalau diminta tambahan iuran lagi, warga merasa repot kalau diminta memilah sampah.
- belum adanya peraturan yang mengatur tentang pemberian sanksi dan reward bagi warga yang mendukung dan melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa perilaku yang diatur terlalu beragam dengan berbagai macam permasalahan sehingga menunjukkan hasil program pengelolaan sampah 3R kurang efektif untuk dilaksanakan di Kelurahan Bulu Lor.

c. Persentase Kelompok Sasaran dibandingkan dengan Jumlah Penduduk

Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin kecil dan semakin jelas perilaku yang akan diubah, maka semakin besar pula peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap program dan dengan demikian akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan. dari hasil pendataan didapat bahwa kelompok sasaran yang dituju yaitu warga masyarakat di wilayah uji coba mencapai 27,96% sedangkan jika dilihat dari jumlah KK yang dilibatkan

mencapai 27,76%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kelurahan Bulu Lor relative kecil/rendah.

d. Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Diinginkan.

Jumlah modifikasi perilaku yang diinginkan bagi tercapainya tujuan formal adalah fungsi dari jumlah total orang yang menjadi kelompok sasaran dan jumlah perubahan yang dituntut dari mereka. Semakin besar perubahan perilaku yang dikehendaki, semakin sulit memperoleh implementasi yang berhasil. Bentuk perubahan perilaku sangat bervariasi, sesuai dengan konsep yang digunakan oleh para ahli dalam pemahamannya terhadap perilaku. Menurut WHO yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), bentuk perubahan perilaku yang dikelompokkan dalam tiga kelompok, diantaranya :

1. perubahan alamiah (natural change)

Perilaku manusia selalu berubah. sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi suatu perubahan lingkungan fisik atau social budaya dan ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat dalarannya juga akan mengalami perubahan.

2. perubahan terencana (planned change)

Perubahan perilaku ini karena memang direncanakan sendiri oleh subjek.

3. kesiediaan untuk berubah (readiness to change)

Apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut (berubah perilakunya), dan sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan setiap orang mempunyai kesiediaan untuk berubah yang berbeda-beda. hasil penelitian dilapangan terkait dengan perubahan perilaku yang lebih kearah untuk mempraktekkan perilaku mengelola sampah yang lebih baik melalui konsep *reuse, reduce dan recycle*. Konsep pengelolaan sampah ini lebih menekankan pada upaya pengurangan sampah yang dibuag ke TPS/TPA.

Kondisi perubahan yang diinginkan di Kelurahan Bulu Lor terkait dengan program pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat termasuk dalam kategori ke tiga yaitu kesediaan masyarakat untuk berubah. Kondisi ini masih sulit di laksanakan karena kesediaan untuk berubah masih rendah terutama dalam hal penanganan sampah yang mereka hasilkan selama ini.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Tahapan implementasi yang dilakukan yang meliputi tahap penentuan lokasi, persiapan dan pelaksanaan pengelolaan sampah sudah sesuai dengan prosedur pendampingan masyarakat.
 - a. Pada tahap penentuan lokasi peran masyarakat di Kelurahan Bulu Lor terbatas hanya pada penentuan lokasi kawasan uji coba sedangkan penentuan seleksi lokasi tingkat kelurahan lebih banyak dilakukan oleh konsultan. Proses seleksi lokasi dilakukan melalui tahap seleksi untuk menentukan wilayah kecamatan terpilih dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Semarang, langkah selanjutnya adalah menentukan kelurahan terpilih berdasarkan kriteria jumlah penduduk terbanyak, kelurahan yang memiliki wilayah bebas dari genangan dan rob, kelurahan yang dilalui saluran drainase baik primer maupun sekunder, kelurahan yang memiliki jumlah timbulan sampah terbesar dari permukiman penduduk dan jumlah TPS di tiap Kelurahan.
 - b. Tahap persiapan yang dilaksanakan meliputi tahap sosialisasi, pembentukan KSM, peningkatan kapasitas lembaga, penyediaan sarana dan prasarana pendukung dan uji coba pelaksanaan pengelolaan sampah.
 - Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan mengundang seluruh komponen masyarakat sedangkan pelaksanaan sosialisasi di tingkat RW/RT terpilih hanya mengundang sebagian masyarakat dan pengurus RW/RT.
 - Proses pembentukan KSM sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam program pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat

dilaksanakan melalui musyawarah oleh tokoh masyarakat, aparat kelurahan, pengurus RT/RW dan konsultan sehingga hasilnya merupakan pilihan dari masyarakat murni.

- Peningkatan kapasitas lembaga dilakukan untuk menyiapkan masyarakat khususnya KSM dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan baik teknis maupun manajemen pengelolaan sampah dan kunjungan studi banding ke wilayah lain yang sudah berhasil melaksanakan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat.
 - Kebutuhan sarana dan prasarana pendukung disediakan sepenuhnya oleh pemerintah sedangkan peran serta masyarakat tidak ada dalam penyusunan kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung ini.
 - Pelaksanaan uji coba pengelolaan sampah dilakukan setelah sarana prasarana pendukung siap, adapun bentuk uji coba yang dilakukan berupa kegiatan pengkomposan dari sampah organik yang dilakukan dalam satu hari.
- c. Tahap implementasi yang dilaksanakan di wilayah terpilih dimulai dari proses pengangkutan sampah, pengolahan sampah, penjualan hasil kompos dan pendanaan masih belum optimal.
- Pelaksanaan pengambilan sampah dilakukan oleh 2 orang petugas dari KSM dengan menggunakan motor sampah. sampah yang diambil masih banyak yang tercampur antara sampah organik dan anorganik. peran serta masyarakat dalam pemilahan sampah tidak berjalan sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam program pengelolaan sampah ini.
 - Sampah yang sudah diambil kemudian diolah di TPST untuk diolah menjadi kompos. Proses pengkomposan yang ada sampai dengan panen kompos tidak menimbulkan gangguan bagi warga sekitar baik berupa bau maupun aspek estetika.
 - Penjualan kompos yang dihasilkan masih dilakukan di dalam wilayah Kelurahan Bulu Lor. Kebijakan penjualan kompos ini dilakukan oleh pihak kelurahan.

- Aspek pendanaan untuk operasional kegiatan program pengelolaan sampah masih ditopang sepenuhnya oleh kelurahan. Partisipasi masyarakat terutama di wilayah uji coba untuk ikut menanggung biaya operasional masih sangat rendah, demikian juga hasil penjualan kompos masih minim.
2. Pada bagian ini akan disimpulkan hasil penelitian yang meliputi fenomena penelitian yang meliputi :
- a. Faktor Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan
- 1) Kesukaran Teknis

Masalah teknis yang muncul berupa :

 - sampah masih belum dipilah sehingga dilakukan pemilahan di TPST dan membutuhkan waktu yang lama.
 - Peran serta masyarakat yang masih rendah terutama dalam bidang penyediaan tempat sampah untuk jenis sampah yang berbeda dan pemilahan sampah.
 - Penyediaan dana untuk operasional masih terbatas dan hanya mengandalkan dana dari kelurahan saja tanpa adanya peran serta masyarakat.
 - Penjualan kompos tidak maksimal
 - 2) Keragaman Perilaku Kelompok Sasaran
 - perilaku kelompok sasaran yaitu pengurus KSM cenderung sama yaitu setuju untuk mengelola sampah di wilayah uji coba.
 - perilaku kelompok sasaran berupa warga masyarakat di wilayah uji coba menunjukkan adanya perbedaan yaitu menerima dan menolak program pengelolaan sampah 3R dan adanya warga yang tidak jelas antara menolak dan menerima.
 - 3) Persentase Kelompok Sasaran dibandingkan dengan Jumlah Penduduk

Kelompok sasaran yang dituju yaitu warga masyarakat di wilayah uji coba dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kelurahan Bulu Lor mencapai 27,96% sedangkan kalau dilihat dari jumlah KK yang dilibatkan mencapai 27,76%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kelurahan

Bulu Lor relative kecil/rendah.

4) Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Diinginkan.

Kondisi perubahan yang diinginkan di Kelurahan Bulu Lor terkait dengan program pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat masih sulit dilaksanakan karena kesediaan untuk berubah masih rendah terutama dalam hal penanganan sampah yang dihasilkan selama ini.

b. Kemampuan Kebijakan untuk Menstrukturkan Proses Pelaksanaan

1) Kejelasan dan Konsistensi Tujuan

Tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan program ini di Kelurahan Bulu Lor sudah jelas yaitu membudayakan masyarakat untuk meminimalisasi sampah yang dihasilkan, mengolah sampah yang dihasilkan dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPS/TPA. Hal ini sudah dipahami dengan baik oleh pengurus KSM namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami/mendukung program ini.

c. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi

1) Kondisi Sosial Ekonomi Dan Teknologi

Adapun kondisi sosial ekonomi dan teknologi masyarakat di Kelurahan Bulu Lor menunjukkan sebagai berikut :

- kondisi sosial ekonomi di wilayah uji coba beragam yang terdiri dari masyarakat ekonomi lemah hingga ekonomi kuat.
- penggunaan teknologi masyarakat sudah cukup maju terutama terkait dengan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai program pengelolaan sampah di wilayahnya.

2) Dukungan Publik

Masyarakat di kelurahan Bulu Lor sudah terbiasa dengan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hanya karena kurangnya sosialisasi dan kampanye tentang program pengelolaan sampah secara berkelanjutan berakibat pada kurangnya perhatian dari masyarakat tentang keberadaan program pengelolaan sampah di wilayahnya. Hal ini berakibat pada dukungan dari masyarakat secara langsung masih terbatas jumlahnya,

sedangkan dukungan dari pemerintah khususnya dari kelurahan sangat dominan.

3) Sikap dan Sumber Daya yang Dimiliki Kelompok

Sumber daya yang ada di Kelurahan Bulu Lor terkait dengan implementasi program pengelolaan sampah 3R menunjukkan :

- Jumlah pengurus KSM pelaksana pengelolaan sampah 3R sudah mencukupi.
- Kinerja pengurus KSM belum optimal, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengurus yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam program tersebut, hal ini dapat dilihat dari keaktifan pengurus yang hanya ketua, sekretaris dan bendahara.
- Pengurus KSM belum menunjukkan kinerja yang maksimal terkait dengan masih dominannya peran dari pihak kelurahan dalam menangani permasalahan yang ada.
- Keterbatasan dana operasional membuat KSM tidak dapat berjalan secara optimal karena tidak adanya dukungan dari masyarakat.

Dari berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh KSM dapat disimpulkan bahwa peran KSM belum dapat berjalan secara optimal walaupun sumber daya yang ada sudah mencukupi/memadai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pada tahap implementasi yang diperhatikan lebih lanjut yaitu :
 - a. keikutsertaan masyarakat dalam penentuan lokasi calon uji coba pengelolaan sampah 3R perlu ditingkatkan, karena masyarakatlah yang mengetahui secara detail dan pasti mengenai calon lokasi yang akan dipilih
 - b. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan iuran operasional untuk TPST adalah melalui sosialisasi secara intensif sampai tingkat RT.

- c. Untuk mencapai jumlah sasaran yang diinginkan dapat dilakukan melalui pendataan ulang bagi warga yang secara sukarela ikut serta dalam program pengelolaan sampah ini baik di dalam atau diluar wilayah uji coba.
 - d. Perlunya dibuat suatu peraturan ditingkat kelurahan yang menekankan pada insentif dan *disentif* bagi warga yang terlibat dalam program ini.
2. Terkait dengan fenomena yang diamati upaya yang dapat dilakukan untuk memperkecil faktor-faktor penghambat bagi implementasi pengelolaan sampah yaitu :

a. Faktor mudah tidaknya masalah dikendalikan

Pada bagaian ini yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah pada:

- faktor kesukaran teknis, yang meliputi pemilahan sampah dapat dilakukan dengan menambah tenaga khusus yang melakukan pemilahan sampah di TPST yang bersifat sementara sampai masyarakat bersedia untuk melakukan pemilahan di tingkat rumah tangga. Sedangkan tidak adanya iuran dari warga di wilayah uji coba dapat dilakukan dengan mengajukan bantuan dana operasional kepada dinas terkait untuk membantu operasional dalam kurun waktu tertentu sampai dengan tercukupinya dana dari masyarakat.
- Untuk keragaman perilaku kelompok sasaran dimana masih banyak warga yang menolak dan tidak mau tahu dengan program ini perlu dilakukan sosialisasi ulang atau bahkan mengganti warga yang menolak dengan warga yang mau terlibat secara sukarela baik di wilayah uji coba maupun di luar wilayah uji coba.

b. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses pelaksanaan

Terkait dengan kejelasan dan konsistensi tujuan terlihat bahwa tujuan yang diakan dicapai sudah jelas yaitu upaya untuk mengurangi timbulan sampah yang di buang ke TPS/TPA namun yang perlu diperhatikan adalah konsistensi tujuan dimana masih ada implementasi yang tidak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Perlunya dilakukan penyepakatan ulang antara KSM, masyarakat dan kelurahan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam program ini.

- c. Faktor di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang meliputi :
- Untuk meningkatkan dukungan publik terhadap pelaksanaan program pengelolaan sampah 3R ini perlu dilakukan pendekatan yang lebih intensif terutama kepada masyarakat diwilayah uji coba dan pendekatan kepada dinas terkait untuk membanu dalam operasional
 - Terkait dengan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja sumber daya kelompok (KSM) maka perlu dilakukan penggantian pengurus yang tidak aktif, meningkatkan kinerja bagian sosialisasi dan mengurangi ketergantungan pada pihak kelurahan.

Daftar Pustaka

- UU No. 18 Tahun 2008 *tentang Pengelolaan Sampah*
 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
 Abidin, Said Zainal, 2002, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta;
 Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press, Surabaya;
 Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta;
 Nugroho, Riant, 2008, *Public Policy (Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate - Metode Penelitian Kebijakan)*, Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta;
 Pedoman Umum 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2008.
 Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
 Sundarso, dkk, 2006, *Teori Administrasi*, Universitas terbuka, Jakarta;
 Syafrudin, Ika Bagus, 2001, *Pengelolaan Limbah Padat*, Program Studi Teknik Lingkungan Undip, Semarang,
 Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi (Konsep, Strategi dan Kasus)*, Kerjasama Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia-Lukman Offset, Yogyakarta;
 Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Media Pressindo, Jakarta;